

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberadaan pendidikan sangat erat hubungannya dengan keberadaan manusia. Kebutuhan dasar dalam pendidikan adalah mempersiapkan SDM agar mampu menjalani kehidupan dan membuat suatu kualitas peradaban. Pendidikan menjanjikan harapan untuk perubahan nasib bagi rakyat suatu negara, serta diyakini sebagai satu-satunya jalan untuk memecahkan masalah kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan.

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dengan bercita-cita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang dapat dilakukan melalui jalan pendidikan. Untuk itu pelaksanaan pendidikan telah diatur dalam UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas yang antara lain menjelaskan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, serta global. Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pada perspektif lain, setiap orang tua menginginkan anak-anaknya cerdas, berwawasan luas dan bertingkah laku baik dan kelak suatu hari anak-anak mereka bernasib lebih baik dari mereka baik dari aspek kedewasaan pikiran maupun kondisi ekonomi. Disetiap benak para orang tua bercita-cita menyekolahkan anak supaya berpikir lebih baik, bertingkah laku sesuai dengan agama serta yang paling utama sekolah dapat mengantarkan anak untuk menghadapi tantangan perubahan zaman yang berlangsung begitu cepat. Namun demikian, kondisi ekonomi masyarakat tentu saja berbeda, tidak semua orang tua memiliki kemampuan ekonomi yang memadai dan mampu memenuhi segala kebutuhan anggota keluarga. Dan salah satu kebutuhan itu adalah kebutuhan akan pendidikan, seperti dalam menyediakan alat-alat yang dapat menyalurkan potensi anak, misalkan buku-buku pelajaran, alat-alat tulis, tas, sepatu, baju seragam sekolah, biaya transportasi dan lain sebagainya. Kondisi inilah yang menyebabkan terjadinya anak putus sekolah.

Gerungan (1988:47), bahwa hubungan orang tua dengan anaknya dalam status sosial-ekonomi serba cukup dan kurang mengalami tekanantekanan fundamental seperti dalam memperoleh nafkah hidupnya yang memadai. Orang tuanya dapat mencurahkan perhatian yang lebih mendalam kepada pendidikan anaknya apabila ia tidak disulitkan dengan perkara kebutuhan-kebutuhan primer kehidupan manusia.

Putus sekolah adalah proses berhentinya siswa secara terpaksa dari suatu lembaga pendidikan tempat dia belajar. Artinya adalah terlantarnya anak dari sebuah lembaga pendidikan formal, yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi keluarga, pengaruh geografis, rendahnya pendidikan orangtua dan pengaruh sosial budaya.

Putus sekolah bukan merupakan persoalan baru dalam sejarah pendidikan di Indonesia. Dari beberapa faktor penyebab tersebut, faktor ekonomi yang paling dominan sebagai indikator penyebab terjadinya putus sekolah. Persoalan ini telah berakar dan sulit untuk dipecahkan, sebab ketika membicarakan solusi maka tidak ada pilihan lain kecuali memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Ketika membicarakan peningkatan ekonomi keluarga terkait bagaimana meningkatkan sumber daya manusianya. Sementara semua solusi yang diinginkan tidak akan lepas dari kondisi ekonomi nasional secara menyeluruh, sehingga kebijakan pemerintah berperan penting dalam mengatasi segala permasalahan pendidikan termasuk perbaikan kondisi masyarakat, sesuai yang diamanatkan UUD 1945.

Menyadari hal tersebut sejak tahun 1994 pemerintah telah mencanangkan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang didasari konsep “Pendidikan dasar untuk semua” (*universal basic education*), yang pada hakekatnya berarti penyediaan akses yang sama untuk semua anak. Dan untuk mendukung tuntasnya program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, pemerintah meluncurkan dana beasiswa yang diberikan kepada warga belajar yang berprestasi serta meluncurkan program “Bantuan Operasional Sekolah” (BOS), dengan tujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi warga belajar tidak mampu dan meringankan bagi yang lainnya, agar memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat. Melalui program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun diharapkan dapat mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dasar yang perlu dimiliki semua warga negara sebagai bekal untuk hidup dengan layak di masyarakat dan melanjutkan

pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi baik ke lembaga pendidikan sekolah ataupun luar sekolah. Dari upaya yang telah dilaksanakan tersebut belum sepenuhnya membuahkan hasil yang memuaskan. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun belum dapat dikatakan tuntas, karena masih terdapat 66 anak yang putus sekolah pada usia wajib belajar 9 tahun di Desa Ambara.

Kondisi ini cukup memprihatinkan, karena masalah anak putus di Sekolah Dasar tidak hanya sekedar urusan ketidakberdayaan tetapi persoalan berkurangnya sumber daya manusia yang pada saatnya tidak sanggup berbuat apa-apa. Oleh sebab itu kasus anak putus sekolah sudah menjadi persoalan yang harus segera dituntaskan. Karena apabila tidak segera diatasi akan menimbulkan berbagai akibat yang bisa merugikan, baik dirinya sendiri, keluarga, masyarakat maupun bangsa, dimasa-masa yang akan datang. Kondisi ini mewarnai kasus-kasus anak putus Sekolah Dasar seperti apa yang terjadi di Desa Ambara, Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo.

Hasil observasi awal yang peneliti lakukan pada bulan Januari tahun 2013, bahwa program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun yang dilaksakan di desa ini belum sepenuhnya berhasil.

Menurut Rasiyo (2008: *Online*) bahwa: “Salah satu parameter keberhasilan pendidikan adalah menuntaskan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) mutu pendidikan agar mencapai 95%”. Bertitik tolak dari teori tersebut, maka berdasarkan data Dokumentasi Cacah Jiwa yang ada di Kantor Desa Ambara tahun 2012 diketahui bahwa jumlah anak usia 7-13 tahun yang tersebar di enam dusun yang ada, sebanyak 434 anak. Sedangkan

Angka Partisipasi Kasar (APK) sebanyak 90,3% atau sekitar 392 anak. Dan Angka Partisipasi Murni (APM) sebesar 75% atau sebanyak 326 anak yang tersebar di dua Sekolah Dasar di desa Ambara. Dengan demikian dapat dikatakan persentase APK dan APM anak usia Sekolah Dasar di desa Ambara masih rendah karena belum mencapai 95%. Besar kecilnya persentase nilai APK dan APM sangat erat hubungannya dengan putus sekolah. Pada saat yang sama, data dokumentasi dari kedua sekolah yang ada di Desa Ambara menunjukkan bahwa pada tahun 2012 anak putus Sekolah Dasar sebanyak 66 siswa atau sekitar 16,8% dari total anak yang pernah mendaftar di sekolah tersebut. Dan saat ini diperkirakan sekitar 11% yang terancam putus sekolah jika diamati dari minimnya angka kehadiran siswa di kelas (Data dokumentasi sekolah).

Sejauh ini kebijakan terhadap factor-faktor yang mempengaruhi putus sekolah di desa Ambara belum diketahui secara mendalam. Secara singkat dokumentasi penelitian dari berbagai para ahli memperlihatkan temuan yang sudah konstan bahwa “Putus sekolah disebabkan karena kemiskinan, dan pendidikan orang tua” (Gomez dalam Gunawan, 2000: 14). Persoalan kemudian adalah bagaimana peranan sumber daya rumah tangga dapat mempengaruhi tinggi rendahnya kemungkinan anak putus sekolah, serta apa alasan utama anak-anak tidak melanjutkan sekolah lagi. Padahal biaya sekolah sudah digratiskan.

Hal ini tentu sangat menarik untuk menjadi perhatian. Apalagi jika kondisi ini sudah berlangsung bertahun-tahun dan pada akhirnya membawa implikasi pada membengkaknya jumlah angkatan kerja yang menganggur karena tidak mempunyai keahlian dan keterampilan yang memadai dalam mengelola alam.

Berbagai upaya pembinaan yang telah dilakukan pemerintah setempat baik melalui pembinaan formal maupun pembinaan non formal, namun karena faktor geografis, mengingat sebagian besar wilayah desa Ambara adalah perbukitan, sehingga pemukiman penduduk tidak terkonsentrasi pada satu tempat menjadikan anak-anak sulit menjangkau sarana dan prasarana pendidikan. Ditambah dengan taraf hidup masyarakatnya berada dibawah standar kemiskinan membuat anak tidak berdaya untuk membuat pilihan-pilihan dalam kehidupannya terutama menyangkut masalah pendidikan. Selain itu kurangnya motivasi serta dukungan orang tua terhadap pendidikan anak. Hal ini sebagai implikasi dari rendahnya tingkat pendidikan orangtua yang sebagian besar hanya lulusan SD, bahkan tidak sekolah. Sekolah bagi masyarakat di desa Ambara hanya merupakan aktifitas sampingan. Kegiatan utama anak adalah membantu orangtua dalam mencukupi kebutuhan keluarga.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan memformulasikan judul: "Faktor-faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Dasar di Desa Ambara Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo".

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apakah yang menyebabkan anak putus Sekolah Dasar di Desa Ambara Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab anak putus Sekolah Dasar di Desa Ambara Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan data awal bagi mahasiswa untuk mendapatkan data-data lainnya yang lebih menyeluruh (komprehensif) di dalam penelitian yang sama atau penelitian yang bersinggungan dengan pokok-pokok bahasan yang ada dalam penelitian ini.

1.4.2 Praktis

Agar penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh lembaga pemerintah atau swasta yang membutuhkan baik sebagai pengetahuan atau sebagai dasar dalam mengambil suatu kebijakan